



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. BASUKI BAHARUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 772426

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1080 m2/153 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 220.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 130.000.000
6. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 112.000.000

1. MOBIL, ZUZUKI GRAND VITARA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.790.438
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.401.790.438
III. HUTANG	Rp.	210.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.191.790.438

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.